Buletin
Parlementaria

3 DPR & Parlemen Afrika Sinergi Perangi Mpox

4 Menguatkan Kemitraan RI-Afrika untuk Pembangunan Berkelanjutan

Kolaborasi Antar-Instansi Agar Tercipta Pemilu yang Netral dan Aman

Muslim: Harus Ada Reformasi Total BUMN di Bidang Farmasi

Penguatan Kerja Sama Selatan-Selatan

Nomor 1310/III/IX/2024 September 2024

Penguatan Kerja Sama Selatan-Selatan

FOTO: DEP/PDT

Ketua DPR RI, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam serta pimpinan BKSAP DPR RI.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi antar parlemen negara-negara *Global South* dalam menghadapi tantangan global dan menolak dominasi kekuatan tertentu dalam dunia internasional. Seruan ini disampaikan saat menutup secara resmi *Indonesia-Africa Parliamentary Forum* (IAPF) di Nusa Dua, Bali.

Dalam pidatonya, Puan Maharani menyoroti bahwa kerja sama negara-negara Selatan-Selatan (*South-South Cooperation*) merupakan kunci untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. "Kita sepakat bahwa parlemen berperan strategis dalam mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan kebijakan luar negeri yang efektif," ujarnya di Nusa Dua, Bali, Minggu (1/9). Ia juga menegaskan bahwa kerja sama ini harus dibangun atas dasar kesetaraan, bukan didikte oleh kepentingan sepihak.

Puan juga menekankan bahwa hubungan antara Indonesia dan Afrika harus terus diperkuat melalui kerja sama di berbagai sektor, seperti pertanian, kesehatan, industri, investasi, dan perdagangan. Menurutnya, keberagaman potensi ekonomi yang dimiliki negara-negara ini dapat dimanfaatkan untuk kemauan bersama. "Forum ini telah menunjukkan bahwa hubungan antara Afrika dan Indonesia dapat diperkuat dengan kerja sama antar parlemen," tegasnya.

Lebih lanjut, Puan mengingatkan bahwa dunia saat ini menghadapi berbagai tantangan global, termasuk ketegangan geopolitik dan pemanasan global, yang memerlukan solidaritas Global South untuk diatasi. Ia juga menekankan komitmen untuk mendu-kung visi Afrika yang lebih sejahtera, damai, dan bersatu dalam konteks Agenda 2063.

Dalam konteks ini, Puan menggarisbawahi pentingnya menjaga prinsip-prinsip Dasasila Bandung sebagai landasan kerja sama ke depan. Ia menegaskan bahwa kolaborasi harus didasarkan pada kesetaraan dan menolak segala bentuk dominasi atau dikte dari pihak manapun. "Kolaborasi kita harus dibangun berdasar kesetaraan, bukan hubungan yang saling mendominasi," tegasnya. **aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya

DPR & Parlemen Afrika Sinergi Perangi Mpox

FOTO: DEP/PDT

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan Parlemen Indonesia dengan Afrika sepakat bersinergi untuk memerangi wabah *monkey pox* (Mpox) atau cacar monyet yang tengah menjadi perhatian dunia. Kesepakatan itu turut menjadi kesimpulan dalam *Indonesia-Africa Parliamentary Forum* (IAPF) yang dihelat DPR RI.

"Kita tadi bersepakat memerangi Mpox, yang bukan hanya menyebar di Afrika dan Indonesia, tetapi juga di dunia," ujar Puan usai konferensi IAPF yang diselenggarakan di Grand Hyatt Hotel, Nusa Dua, Bali, Minggu (1/9).

Ia menegaskan, parlemen dapat berperan dalam mengatasi berbagai isu global dan regional dengan jalur diplomasi damai. Termasuk, kata Puan, pada isu kesehatan Mpox yang telah dinyatakan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat global. "Mpox menyebar bukan hanya di Afrika dan Indonesia tapi juga di dunia," ungkap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Dalam upaya mengurangi penyebaran Mpox di Tanah Air, pemerintah Indonesia telah melaksanakan beberapa langkah pencegahan, salah satunya dengan melakukan pemeriksaan kesehatan di setiap pintu masuk internasional. **gal/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya

Biro Pemberitaan Parlemen

PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH
Suprihartini S.IP., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
M. Ibnurkhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI
Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR
Agung Hidayat, S.I.P, Ridwan Budiman, S.I.P, Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI
Fadlun Bariyah, Prima Danutirto, A.Md,
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI
Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonco Sitompul, Zulfikar Mubien, Yasmin Nabila

FOTOGRAFER
Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Geraldi Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen, Moh Farhan Nur Fikri

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E. Indah Ekawati, S.I.Kom.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Menguatkan Kemitraan RI-Afrika untuk Pembangunan Berkelanjutan

FOTO: EOT/PDT

Ketua BKSAP DPR RI, Fadli Zon, saat menyampaikan pidato di Forum Parlemen Indonesia-Afrika (IAPF).

Forum Parlemen Indonesia-Afrika (IAPF) menyoroti pentingnya memperkuat kemitraan antara Indonesia dan negara-negara Afrika untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dengan tema "*Forging Indonesia-Africa Parliamentary Partnership for Development*" forum ini menghasilkan berbagai rekomendasi penting yang diharapkan dapat mendorong kolaborasi yang lebih erat di antara negara-negara berkembang.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, dalam laporannya menekankan pentingnya memperkuat kerja sama Selatan-Selatan. Ia menyatakan bahwa diplomasi parlemen harus menjadi sarana untuk mengurangi ketidaksetaraan dan mencapai pembangunan yang inklusif di antara negara negara berkembang.

"Kita perlu memanfaatkan diplomasi parlementer untuk memperjuangkan pembangunan yang adil dan merata," tegas Fadli Zon saat memberikan laporan usai forum di Nusa Dua, Bali, Minggu (1/9).

Selain itu, forum ini juga berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Agenda Afrika 2063 juga diperkuat dalam forum ini. Delegasi dari berbagai negara menekankan pentingnya kerja sama yang kuat dan saling menguntungkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan global tersebut.

Fadli Zon juga berharap bahwa peringatan 70 tahun Konferensi Asia-Afrika pada tahun 2025 akan menjadi momen refleksi atas kemajuan yang telah dicapai oleh negara-negara berkembang. Ia mengajak semua pihak untuk tetap berpegang pada nilai-nilai Semangat Bandung dalam mendorong pembangunan yang adil dan merata di seluruh dunia.

"Semangat Bandung harus terus menjadi inspirasi kita dalam memperjuangkan keadilan dan kemakmuran bersama," pungkasnya.

IAPF 2024 diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam mempererat kemitraan Indonesia-Afrika dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. **aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya

Peluang Investasi Energi Terbarukan di IAPF

FOTO: DEP/PDT

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana saat mengikuti sesi ketiga di Indonesia-Africa Parliamentary Forum (IAPF).

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana sebagai moderator dalam sesi ketiga di Indonesia-Africa Parliamentary Forum (IAPF), menekankan pentingnya mengintegrasikan investasi energi terbarukan dalam strategi pembangunan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan.

John Anis, CEO Pertamina New & Renewable Energy, menjelaskan bahwa energi terbarukan memiliki potensi besar dalam mengatasi tantangan energi global. "Investasi dalam energi terbarukan tidak hanya memenuhi kebutuhan energi yang mendesak tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru yang dapat menjangkau masyarakat luas," ujarnya John bertindak sebagai panelis dalam sesi ketiga ini.

Menurut Anis, sektor energi terbarukan menawarkan peluang untuk inovasi dan pengembangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Energi terbarukan dapat memberikan akses yang lebih baik ke sumber daya energi yang bersih dan berkelanjutan, terutama di daerah yang sebelumnya tidak terjangkau," tambahnya.

Putu Supadma juga mencatat bahwa pemanfaatan energi terbarukan sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan global. "Penting untuk memanfaatkan potensi energi terbarukan sebagai bagian dari strategi pembangunan untuk memastikan pertumbuhan yang ramah lingkungan dan inklusif," ungkapnya.

Investasi dalam energi terbarukan diketahui memang berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan akses energi di wilayah yang kurang berkembang. Ini menggarisbawahi kontribusi penting sektor ini dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dengan mendukung investasi energi terbarukan, Indonesia dan negara-negara Afrika dapat menciptakan dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan. "Kerjasama dalam energi terbarukan akan memperkuat kemitraan kita dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di seluruh kawasan," tutup Rudana. **aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya

Kemitraan Strategis antara Indonesia dan Afrika, Tanggulangi Penyakit Tropis

FOTO: DEP/PDT

Anggota BKSAP DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa saat sesi kedua di Indonesia-Africa Parliamentary Forum (IAPF) di Nusa Dua, Bali, Minggu (1/9/2024).

Forum Parlemen Indonesia-Afrika (IAPF) menggarisbawahi kemitraan strategis antara Indonesia dan negara-negara Afrika dalam penanggulangan penyakit tropis. Dalam pidatonya, Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa menekankan, baik Indonesia dan Afrika dapat bekerja sama dalam pertukaran ilmuwan dan ahli pertanian, untuk meningkatkan kapasitas kesehatan dan pengembangan obat.

"Kita perlu memperkuat sinergi dalam pengembangan vaksin dan obat untuk penyakit tropis, agar akses terhadap solusi kesehatan dapat diperluas dan dirasakan manfaatnya oleh semua orang," katanya dalam sesi kedua di *Indonesia-Africa Parliamentary Forum* (IAPF) di Nusa Dua, Bali, Minggu (1/9). Panelis seperti Prof. Dr. Ir. Taryono, M.Sc., menyoroti pentingnya kolaborasi dalam pengembangan teknologi pertanian yang dapat berkontribusi pada penelitian dan pengembangan vaksin untuk penyakit tropis.

Prof. Adi Utarini juga berbicara tentang perlunya kerja sama dalam penelitian kesehatan untuk meningkatkan efektivitas vaksin dan obat-obatan yang diperlukan di kedua wilayah. Yuliana Indriati dari Biofarma menjelaskan bagaimana perusahaan berperan dalam mendukung kerja-sama internasional dengan menyediakan dukungan teknis dan logistik untuk distribusi vaksin.

Adde menambahkan bahwa kemitraan ini menunjukkan komitmen bersama untuk menghadapi tantangan kesehatan global dengan solusi yang berkelanjutan. Upaya-upaya ini menunjukkan komitmen kedua belah pihak untuk saling berbagi pengetahuan dan memperkuat kapasitas pe-nanggulangan penyakit tropis.

Kemitraan ini tidak hanya memperkuat kapasitas kesehatan lokal tetapi juga membangun fondasi yang lebih solid untuk penanggulangan penyakit secara global. Dengan strategi-strategi ini, diharapkan kedua belah pihak dapat mengatasi tantangan kesehatan yang mendesak dan meningkatkan kualitas hidup ma-syarakat di kedua wilayah.

aha

Scan QR untuk berita selengkapnya

Dampak Geopolitik dan Perubahan Iklim pada Pencapaian SDGs

FOTO: DEP/PDT

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Sukamta, saat interupsi dalam sesi pertama Indonesia-Africa Parliamentary Forum (IAPF) di Nusa Dua, Bali, Minggu (1/9/2024).

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Sukamta dalam sesi pertama *Indonesia-Africa Parliamentary Forum* (IAPF) menyoroti bagaimana faktor-faktor ini menghambat kemajuan global menuju SDGs. Ia menjelaskan bahwa konflik dan ketegangan geopolitik sering kali mengalihkan sumber daya dan perhatian dari upaya pembangunan berkelanjutan.

"Geopolitik yang tidak stabil dan konflik regional memperburuk kondisi ekonomi dan sosial, sehingga menghambat pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan," katanya dalam interupsi di forum tersebut, Nusa Dua, Bali, Minggu (1/9).

Pandemi Covid-19 juga telah memberikan dampak yang signifikan, memperburuk krisis kesehatan dan ekonomi, serta memperlebar ketimpangan sosial. Selain itu, perubahan iklim terus menjadi ancaman besar bagi pencapaian SDGs, terutama dalam hal ketahanan pangan, air bersih, dan kesehatan.

Di tengah tantangan tersebut, Sukamta menekankan bahwa Kerja Sama Selatan-Selatan (SSC) menawarkan solusi yang berpotensi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Melalui SSC, negara-negara dapat bekerja sama dalam bidang-bidang kritis seperti mitigasi perubahan iklim, pengelolaan bencana, dan peningkatan ketahanan pangan. Sukamta juga menambahkan bahwa inisiatif seperti ini dapat membantu negara-negara berkembang untuk lebih cepat pulih dari krisis dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.

Ia menegaskan pentingnya memperkuat dan memperluas Kerja Sama Selatan-Selatan sebagai bagian dari strategi global untuk mengatasi tantangan-tantangan besar yang dihadapi dunia saat ini. "Kerja Sama Selatan-Selatan tidak hanya mempercepat pencapaian SDGs tetapi juga membangun solidaritas dan kerjasama yang lebih kuat antar negara berkembang," tutup Sukamta. **aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya

Agenda 2063 Afrika: Tantangan dan Peluang bagi Kerja Parlemen

FOTO: DEP/PDT

Anggota BKSAP DPR RI, Dyah Roro Esti, saat sesi pertama Indonesia-Africa Parliamentary Forum (IAPF) di Nusa Dua, Bali, Minggu (1/9/2024).

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dyah Roro Esti dalam sesi pertama Indonesia-Africa Parliamentary Forum (IAPF) menyatakan penyesuaian kerangka legislatif dengan Agenda 2063 Afrika menjadi fokus utama dalam upaya mendukung pembangunan berkelanjutan di benua tersebut

Ia menegaskan bahwa Agenda 2063, yang merupakan cetak biru pembangunan jangka panjang Afrika, membutuhkan dukungan legislatif yang kuat dan terkoordinasi. "Seiring dengan proyeksi pertumbuhan lebih dari 5% di 17 negara Afrika pada tahun 2025, penyesuaian kebijakan dan kerangka legislatif menjadi krusial untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif," ujarnya di Nusa Dua, Bali, Minggu (1/9).

Legislasi yang selaras dengan Agenda 2063 dinilai dapat memainkan peran penting dalam mendorong ekonomi yang terdiversifikasi dan tangguh. Dyah juga menyebut bahwa kolaborasi antarparlemen di seluruh dunia, termasuk Indonesia, diperlukan untuk memajukan agenda ini. "Kebijakan yang dirancang dengan mempertimbangkan realitas lokal dan tantangan global akan menjadi kunci sukses dalam mewujudkan visi Afrika yang lebih sejahtera," tambahnya.

Dalam forum tersebut, para panelis juga membahas bagaimana kerangka legislatif dapat mendukung target-target spesifik dari Agenda 2063. Diskusi menekankan perlunya harmonisasi kebijakan antar negara untuk mengatasi hambatan yang mungkin muncul dalam implementasi agenda tersebut.

Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat diterapkan oleh parlemen di berbagai negara. Upaya ini bertujuan untuk mempercepat implementasi Agenda 2063 dan memastikan bahwa pertumbuhan yang dicapai benar-benar bermanfaat bagi seluruh masyarakat Afrika. aha

Scan QR untuk berita selengkapnya

Langkah Indonesia Perkuat Kerja Sama dengan Afrika

FOTO : DEP/PDT

Anggota BKSAP DPR RI Puteri Komarudin di sesi diskusi IAPF.

Anggota BKSAP DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan peran Parlemen Indonesia dalam memperkuat kerja sama dengan Afrika dalam *Indonesia-Africa Parliamentary Forum* (IAPF) yang diselenggarakan pertama kali di Nusa Dua, Bali pada Minggu (1/9).

"Kami telah melakukan reformasi regulasi dengan mengesahkan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diantaranya menyederhanakan proses perizinan ekspor-impor agar mengurangi biaya dan ketidakpastian perdagangan. UU ini juga mengatur pembinaan bagi pelaku ekspor. Dengan demikian, regulasi ini diharapkan semakin mempermudah bagi pelaku usaha dan UMKM untuk menjangkau pasar Afrika," ungkap Puteri.

Dari segi anggaran, Puteri menyebut DPR juga telah memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) secara selektif kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang fokus dalam mendorong peningkatan ekspor. "Misalnya, pada tahun 2024, kami di Komisi XI menyetujui PMN sebesar Rp5 triliun kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk membantu pelaku usaha dan lembaga keuangan dalam melakukan ekspansi bisnis ke negara non tradisional, termasuk Afrika," ujar Puteri.

Kemudian, DPR juga menyetujui PMN sebesar Rp68 miliar kepada Bio Farma pada tahun 2024 untuk pengembangan fasilitas produk vaksin. Bio Farma telah mengekspor produk vaksin ke lebih dari 150 negara di dunia, termasuk 50 negara di Afrika.

Selain itu, DPR juga mendukung investasi pemerintah kepada Indonesia AID yang mencapai Rp6 triliun hingga tahun 2022. Indonesia AID sebagai lembaga donor Indonesia nantinya akan mengelola investasi ini untuk pemberian hibah ke negara lain, termasuk negara-negara di Afrika.

Menutup keterangannya, Puteri menilai Indonesia dan Afrika juga memiliki kesamaan untuk membangun masa depan yang lebih inklusif dan adil melalui Visi Indonesia Emas 2045 dan Agenda Pembangunan Afrika 2063. Kedua visi ini memiliki kesamaan yang fokus pada pembangunan manusia melalui pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan perempuan dan pemuda. **aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya

Peningkatan Potensi Ekspor Indonesia ke Afrika Pasca Pandemi

FOTO: DEP/PDT

Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F. Paulus, saat diwawancara usai menghadiri pembukaan Indonesia-Africa Parliamentary Forum (IAPF) di Nusa Dua, Bali, Minggu (1/9/2024).

Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F. Paulus, menekankan pentingnya memulihkan dan meningkatkan ekspor Indonesia ke Afrika, terutama di sektor minyak sawit, tambang, dan produk pertanian, setelah dampak pandemi COVID-19 mulai mereda. Pernyataan ini disampaikan usai menghadiri pembukaan *Indonesia-Africa Parliamentary Forum* (IAPF) di Nusa Dua, Bali, Minggu (1/9).

Lodewijk mengakui bahwa ekspor Indonesia ke Afrika saat ini masih mengalami defisit, dengan banyak negara Afrika yang belum membuka kantor perwakilan kedutaan di Indonesia. "Kebanyakan, kalau kita lihat, memang potensi ekspor kita masih defisit. Dan banyak negara di Afrika yang belum membuka kantor perwakilan kedutaan di Indonesia, mereka masih merangkap dengan negara lain," ujar Lodewijk.

Meski demikian, Lodewijk menegaskan bahwa Indonesia harus melihat potensi yang ada dan apa yang dibutuhkan oleh Afrika untuk mendorong ekspor. "Kita harus melihat potensi-potensi yang ada di Indonesia dan apa yang dibutuhkan oleh Afrika, sehingga kita bisa mendorong ekspor tersebut," tambah Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Sektor minyak sawit dan tambang disebut Lodewijk sebagai dua potensi besar yang bisa dikembangkan. Selain itu, produk-produk pertanian juga menjadi salah satu fokus utama yang akan didorong oleh Indonesia. "Contohnya, kita memiliki potensi besar di sektor minyak sawit dan beberapa sektor tambang. Selain itu, produk-produk pertanian juga menjadi salah satu yang akan kita dorong," kata Lodewijk.

Sebagai contoh keberhasilan, Lodewijk menyebutkan bahwa Indonesia telah membuka pabrik mie instan di Nigeria, yang berhasil karena selera pasar lokalnya. "Di Nigeria, kita telah membuka pabrik mie instan, karena ternyata selera mereka cocok dengan produk kita," jelasnya. **aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya

Fadli Zon Dorong Dukungan Terhadap Kemerdekaan Palestina untuk Ciptakan Perdamaian Global

FOTO: DEP/PDT

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon, saat pidato pada sesi khusus Forum Parlemen Indonesia-Afrika (IAPF) di Nusa Dua, Bali.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon dalam Forum Parlemen Indonesia-Afrika (IAPF) menyoroti pentingnya dukungan global terhadap kemerdekaan Palestina. Dukungan tersebut merupakan upaya Indonesia dan negara-negara Afrika dalam menciptakan perdamaian dan keadilan dunia.

Scan QR untuk berita selengkapnya

Dalam pidatonya pada sesi khusus forum tersebut, Fadli, yang juga merupakan anggota Komite Eksekutif Union Parlemen Internasional (IPU) dan Wakil Ketua Liga Parlemen untuk Al-Quds dan Palestina, menekankan pentingnya advokasi global untuk kemerdekaan Palestina.

"Sebagai wakil rakyat, kita harus membangun jembatan untuk perdamaian yang berkelanjutan dan mempromosikan penghormatan terhadap hukum internasional serta hak asasi manusia melalui setiap upaya, termasuk diplomasi parlemen. Tidak akan ada perdamaian dunia sampai setiap negara dan setiap manusia hidup dalam kedamaian dan bebas dari ketakutan," ujarnya di Nusa Dua, Bali, Minggu (1/9).

Dia mengajak parlemen Afrika untuk lebih aktif mendukung perjuangan Palestina, yang menurutnya adalah bagian dari komitmen terhadap kemanusiaan dan solidaritas. "Saya berharap forum ini akan membuka jalan bagi penguatan kerjasama parlementer antara parlemen kita untuk mendukung perjuangan saudara-saudari kita di Palestina, serta menyuarakan pesan harapan untuk kemerdekaan Palestina dan membuat berbagai upaya untuk mencapainya," ujarnya.

Fadli juga menekankan bahwa Indonesia sangat menghargai kerja sama dengan negara-negara Afrika untuk mencapai tujuan bersama seperti kemakmuran ekonomi, pertumbuhan berkelanjutan, keamanan pangan dan kesehatan, serta pengembangan energi terbarukan.

"Memperkuat jaringan dan kemitraan antara parlemen negara-negara Afrika dan Indonesia juga dapat mendukung kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan dengan menghadapi tantangan bersama dan mendorong pembangunan strategis yang menguntungkan semua negara." tuturnya. **aha**

Gala Dinner Sambut Delegasi IAPF, Forum Ini Jadi Babak Baru Hubungan RI-Afrika

FOTO: GER/PDT

Ketua DPR RI Puan Maharani dalam foto bersama usai menjamu para delegasi IAPF pada gala dinner di Nusa Dua, Bali, Sabtu (31/8/2024).

Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut delegasi *Indonesia-Africa Parliamentary Forum (IAPF)* dengan jamuan makan malam atau *gala dinner*. Forum parlemen Indonesia dengan negara-negara Afrika itu dinilai menjadi lembaran baru hubungan kedua belah pihak. DPR RI sebagai tuan rumah menjamu para delegasi dengan sambutan makan malam (*welcoming dinner*) di Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua, Bali, Sabtu (31/8) malam

"Dengan jamuan makan malam ini saya berharap menjadi babak baru atau pembuka lembaran baru hubungan kerjasama Indonesia dengan negara-negara Afrika," ujar Puan saat menyampaikan pidato dalam Gala Dinner.

Rangkaian kegiatan makan malam dihadiri oleh seluruh delegasi negara-negara Afrika. Acara IAPF diselenggarakan sejak hari ini hingga 2 September mendatang di Bali.

"Kami merasa senang dapat berkumpul di Bali, sebuah pulau yang terkenal dengan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia di mata internasional," kata perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR itu.

Dengan konsep taman di pinggir pantai Nusa Dua, susana Gala Dinner semakin meriah namun hangat. Para delegasi pun tampak menikmati suasana malam Pulau Dewata sambil disuguhkan makanan tradisional dan pertunjukan budaya Indonesia.

"Di sinilah budaya tradisional berpadu dengan budaya modern," jelas Puan.

Menurut Puan, hubungan antara Indonesia dengan negara-negara Afrika memiliki sejarah panjang. "Persaudaraan dan solidaritas bangsa Asia dan Afrika telah dipupuk sejak Tahun 1995 saat Konferensi Asia Afrika (KAA) sekitar 69 tahun lalu," ungkap cucu Presiden pertama RI Sukarno tersebut.

Puan menilai, hubungan Afrika dan Indonesia bukan hanya sekadar hubungan historis. Namun juga tentang bagaimana mengeksplorasi peluang kerja sama di masa depan.

"Untuk itu, kita harus membangun hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati, saling menghargai keberagaman, dan berdasar kesetaraan," tutur Puan. **aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya

Pentingnya Kelengkapan Senjata Babinsa dalam Pengamanan Pilkada

FOTO: RR/PDT

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto memimpin kunjungan.

Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi I DPR RI mengunjungi Komando Resor Militer (Korem) 061/Surya Kencana untuk menanyakan kesiapan satuan teritorial militer tersebut dalam rencana pengamanan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

"Hari ini adalah Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I ke Korem 061 Surya kencana di Bogor, intinya kami menanyakan kesiapan mereka untuk pemilihan kepala daerah serentak," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto usai memimpin Kunspek Komisi I ke Korem 061/Surya Kencana, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (28/8).

Korem 061/Surya Kencana yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Faisol memiliki wilayah kerja yang cukup luas di Provinsi Jawa Barat. Diantaranya meliputi Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.

Terkait rencana pengamanan Pilkada serentak tahun 2024 yang akan dilakukan TNI AD, terdapat beberapa catatan yang menjadi sorotan Komisi I DPR. Salah satunya yaitu rencana perbantuan TNI kepada Polisi dalam pengamanan posko TPS (Tempat Pemungutan Suara) oleh personil Bintara Pembina Desa (Babinsa) dengan tanpa membawa senjata api dan tajam.

Utut mengungkapkan meski bertujuan baik, namun menurutnya rencana itu perlu dipertimbangkan oleh TNI. Hal itu mengingat alat kelengkapan senjata baik api maupun tajam, sudah seharusnya melekat pada setiap personil TNI sebagai satuan militer dalam tugas pemeliharaan perdamaian walaupun sebagai perbantuan Polisi dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

"Konsep perbantuan kepada polisi ini juga harus kita kaji ulang atau kita analisis, sebab apabila tidak membawa senjata apa konsekuensinya dan apabila membawa senjata apa konsekuensinya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ungkapnya. **rr/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya

DPR RI Sahkan RUU P2 APBN 2023 Jadi Undang-Undang

FOTO: FHN/PDT

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat menerima laporan Badan Anggaran DPR RI yang dibacakan oleh Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohamad Said, di Rapat Paripurna, Selasa (3/9/2024).

Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (RUU P2 APBN 2023) secara resmi telah disetujui oleh DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025.

"Berikut kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota. Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2023 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9). Para anggota dewan yang hadir menyambutnya dengan jawaban 'setuju'.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohamad Said membacakan laporan Badan Anggaran DPR RI mengenai hasil pembicaraan Tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelak-sanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023. Dari pembicaraan Tingkat I tersebut, sebanyak delapan fraksi menyetujui atau menerima RUU P2 APBN 2023 dan satu fraksi (F-PKS) menyetujui atau menerima dengan *minderheids* nota RUU P2 APBN 2023.

Hadir mewakili Pemerintah, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani pun menyampaikan apresiasi kepada DPR RI atas kelancaran pembahasan UU serta dukungan dewan dalam mengawal instrument APBN dan terus menjadi *partner* Pemerintah dalam menjaga perekonomian Indonesia. Terutama dalam mengantisipasi dan merespons kondisi global dan nasional yang dinamis agar penggunaan APBN yang fleksibel tetap akuntabel dan terukur.

"Peranan DPR di dalam mengawal dan mengawasi APBN serta partisipasi masyarakat dunia usaha di dalam terus menjalankan tujuan pembangunan merupakan suatu peranan yang luar biasa penting ini merupakan bentuk kebersamaan di dalam mewujudkan tujuan bangsa yaitu mencapai negara maju adil dan beradab," ujar Sri Mulyani. **gal/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya

Junico Siahaan: Kolaborasi Diskominfo Berperan Penting Jaga Netralitas Pilkada Jabar

FOTO : TN/PDT

Anggota Komisi I DPR RI Junico BP Siahaan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Diskominfo Jabar, Kota Bandung, Rabu (28/8/2024).

Anggota Komisi I DPR RI Junico BP Siahaan mengatakan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 merupakan momen krusial dalam perjalanan demokrasi Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Sebagai provinsi terpadat di Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai 49,3 juta jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, Jawa Barat memiliki peran strategis dalam lanskap politik nasional.

Pilkada Serentak 2024 di Jawa Barat akan melibatkan pemilihan di 18 kabupaten/kota, menjadikannya salah satu wilayah dengan jumlah pilkada terbanyak di Indonesia.

Menurutnya dalam era digital dan informasi yang semakin pesat, peran media massa, terutama televisi dan radio, masih sangat signifikan dalam membentuk opini publik dan memengaruhi preferensi pemilih. Berdasarkan survei *Nielsen Consumer Media View* pada tahun 2017, penetrasi televisi di Indonesia mencapai 96%, sedangkan radio masih menjangkau sekitar 37% populasi.

"Di Jawa Barat sendiri, tingkat penetrasi media elektronik ini diperki-rakan lebih tinggi mengingat infrastruk-tur yang relatif lebih maju dibandingkan daerah lain di Indonesia. Namun, besarnya potensi jangkauan media ini juga mem-bawa tantangan tersendiri, terutama dalam hal netralitas dan objektivitas pemberitaan serta konten siaran terkait Pilkada," tuturnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Diskominfo Jabar, Kota Bandung, Rabu (28/8).

Politisi PDI-Perjuangan ini menambahkan, data dari Bawaslu RI menunjukkan bahwa selama Pemilu 2019, terdapat 58 kasus dugaan pelanggaran kampanye melalui media massa di seluruh Indonesia, dengan 15% di antaranya terjadi di Jawa Barat. Fenomena ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap konten siaran pilkada untuk menjamin *fairness* dan integritas proses demokratis.

"Kolaborasi antara Diskominfo Jawa Barat, LPP TVRI, LPP RRI, KPI Pusat, dan KPID dalam mengawasi isi dan konten siaran Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Jawa Barat menjadi sebuah kebutuhan yang tidak terelakkan," imbuhnya.

tn/aha

> **KOLABORASI ANTARA DISKOMINFO JAWA BARAT, LPP TVRI, LPP RRI, KPI PUSAT, DAN KPID DALAM MENGAWASI ISI DAN KONTEN SIARAN PILKADA SERENTAK 2024 DI PROVINSI JAWA BARAT MENJADI SEBUAH KEBUTUHAN YANG TIDAK TERELAKKAN.**
>
> ***Junico BP Siahaan*** Anggota Komisi I DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya

Kolaborasi Antar-Instansi Agar Tercipta Pemilu yang Netral dan Aman

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan bahwa dalam menciptakan pesta demokrasi yang netral serta kondusif dan aman maka perlu adanya kolaborasi antara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, KPI Daerah Banten, Radio Republik Indonesia (RRI) Banten dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) Banten. Hal itu agar pesta demokrasi lima tahunan ini menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat Banten.

"Kita meminta kepada mitra untuk berkolaborasi agar upaya-upaya yang dilakukan dalam keadaan netral dan tidak berpihak pada siapapun. Terutama TVRI dan RRI harus ambil bagian, supaya jujur, dan tidak berat sebelah dalam konteks menghasilkan para pemimpin sesuai dengan harapan rakyat Banten," katanya saat diwawancarai **Parlementaria** usai kunjungan kerja spesifik di Kantor Gubernur Banten, Kota Serang, Provinsi Banten, Rabu (28/8).

FOTO : CAS/PDT

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin saat kunjungan kerja spesifik di Kantor Gubernur Banten, Kota Serang, Provinsi Banten, Rabu (28/8/2024).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mengatakan upaya kolaborasi tersebut agar Banten mendapatkan pemimpin yang mengabdi pada rakyat untuk kemajuan rakyatnya, bukan mengabdi pada keluarganya. Serta dapat memajukan potensi yang ada di berbagai sektor untuk kemaslahatan masyarakat Banten ke depan.

"Pada prinsipnya NKRI harus maju lebih baik dan tentu melalui pembangunan fisik dan non fisik dan itu tentu dengan sistem desentralisasi dibutuhkan pemimpin yang visioner. Untuk itu kami mendorong mitra kami ke arah itu agar bisa mendapatkan pemimpin yang tepat yang sesuai harapan," jelasnya.

Diharapkan, tambahnya, pesta demokrasi di Banten penuh dengan kedamaian dan kegembiraan jangan sampai ada adu domba dan hal-hal yang tidak diinginkan dalam pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 itu.

cas/rdn

> **KITA MEMINTA KEPADA MITRA UNTUK BERKOLABORASI AGAR UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM KEADAAN NETRAL DAN TIDAK BERPIHAK PADA SIAPAPUN. TERUTAMA TVRI DAN RRI HARUS AMBIL BAGIAN, SUPAYA JUJUR, DAN TIDAK BERAT SEBELAH DALAM KONTEKS MENGHASILKAN PARA PEMIMPIN SESUAI DENGAN HARA-PAN RAKYAT BANTEN.**
>
> **TB Hasanuddin** Anggota Komisi I DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya

Rosiyati Thamrin Minta Program Pemberian Bantuan Dana Pendidikan Libatkan Swasta

Anggota Komisi X DPR RI Rosiyati MH Thamrin meminta pemerintah melibatkan sekolah swasta dalam program pemberian bantuan dana pendidikan. Dia menilai selama ini setiap ada program mengenai bantuan dana pendidikan dari kementerian atau lembaga terkait, jarang sekali melibatkan pihak swasta.

"Semua masyarakat Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi. Jadi, kita perlu mengubah *mindset* dulu, bahwa setiap ada bantuan, setiap ada program, libatkanlah swasta," ujar Rosi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI dalam Panja Pembiayaan Pendidikan baru-baru ini.

FOTO : DEP/PDT

Anggota Komisi X DPR RI Rosiyati MH Thamrin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI dalam Panja Pembiayaan Pendidikan baru-baru ini.

Menurut dia, banyak lembaga pendidikan swasta formal maupun informal yang memiliki fasilitas dan tenaga pendidik yang mumpuni, hanya perlu mendapatkan bantuan biaya operasional guna ikut ambil bagian dalam peningkatan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.

"Saya minta sekali lagi untuk dari PAUD, SD, SMP sampai perguruan tinggi, tolong libatkan yang bergerak di pendidikan swasta, apapun itu. Kita klasterkan sesuai dengan kemampuan dan kondisi setempat," lanjut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Bantuan biaya operasional tersebut, lanjut dia, pada dasarnya juga diperuntukkan bagi peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi, namun tidak pula lulus seleksi penerimaan di lembaga pendidikan negeri. Sehingga, hal itu tentu membutuhkan bantuan dana ataupun beasiswa untuk melanjutkan jenjang pendidikan.

"Jadi tolong negara kita ini negara Indonesia yang semua warga negara, wajib juga merasakan kue-kue dari pemerintah. Kalau mengalokasikan untuk lembaga pendidikan negeri saja, nanti semua yang swasta itu jangan bayar pajak," katanya.

Dia pun sudah mendapat masukan dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) terkait besaran alokasi dana yang dibutuhkan untuk memeratakan layanan dan kualitas pendidikan bila melibatkan pihak swasta. Alokasi dana tersebut, lanjut dia, tidak sebesar bila pemerintah harus membangun atau merenovasi sekolah negeri demi memenuhi kebutuhan tersebut.

"Bersyukurlah kita bahwa pihak swasta mau membantu untuk pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi, hanya mereka membutuhkan biaya operasional. Tidak butuh banyak sampai ratusan triliun rupiah. Kemarin ICW menghitung hanya Rp84 triliun kalau sekolah-sekolah swasta itu dilibatkan dalam operasional penerimaan peserta didik ini," ujar Rosi. **hal/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya

Nasir Djamil Beri Atensi Khusus untuk KPK dan Komnas HAM

Komisi III berkomitmen untuk memperjuangkan tambahan anggaran kepada para mitra kerjanya, termasuk KPK dan Komnas HAM. Diketahui, Kementerian Keuangan telah menetapkan pagu anggaran tahun 2025 bagi KPK sebesar Rp1,23 triliun. KPK juga mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp201,9 miliar yang akan diperjuangkan oleh Komisi III DPR RI.

Senada, Komisi III juga akan memperjuangkan usulan tambahan anggaran untuk Komnas HAM sebesar Rp37,1 miliar, dari ketetapan pagu anggaran di 2025 dari Kemenkeu sebesar Rp99,5 miliar.

Menanggapi itu, Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menjelaskan bahwa situasi keuangan negara saat ini mengalami tantangan. "Keuangan Republik ini dalam kondisi tidak baik-baik saja," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi III dengan para mitra kerjanya, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9).

Ia juga mengingatkan bahwa tambahan anggaran yang diajukan oleh mitra kerja Komisi III bukanlah sekadar tambahan, melainkan kebutuhan yang belum terpenuhi. Karena itu, ia berharap agar KPK dengan keahliannya dapat membantu mengawasi APBN 2025 agar tetap dalam koridor yang telah ditetapkan.

FOTO: GER/PDT

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil saat mengikuti Rapat Kerja Komisi III dengan para mitra kerjanya, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

> **"BAHWA TAMBAHAN ANGGARAN YANG DIAJUKAN OLEH MITRA KERJA KOMISI III BUKANLAH SEKADAR TAMBAHAN, MELAINKAN KEBUTUHAN YANG BELUM TERPENUHI. KARENA ITU, IA BERHARAP AGAR KPK DENGAN KEAHLIANNYA DAPAT MEMBANTU MENGAWASI APBN 2025 AGAR TETAP DALAM KORIDOR YANG TELAH DITETAPKAN.**
>
> **Nasir Djamil** Anggota Komisi III DPR RI

Selain itu, ia meminta Komnas HAM memberikan penjelasan lebih rinci terkait rencana pengawasan terhadap proyek Ibu Kota Negara (IKN) yang mendapat alokasi anggaran khusus.

Rapat kerja ini menunjukkan komitmen DPR RI, khususnya Komisi III, dalam mendukung keberlanjutan program-program penting yang dijalankan oleh KPK, LPSK, dan Komnas HAM serta Komnas Perempuan. Dengan memperjuangkan tambahan anggaran yang dibutuhkan, diharapkan lembaga-lembaga ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih efektif di tahun 2025.

ssb/rdn

Scan QR untuk berita selengkapnya

Dukung Program Ekonomi Biru, Komisi IV Perjuangkan KKP Tambah Anggaran Rp6,16 Triliun di 2025

FOTO: AFR/PDT

Wakil Ketua Komisi IV DPR Anggia Erma Rini saat memimpin agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR dengan jajaran Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Komisi IV DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran tahun 2025 untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebanyak Rp6,16 triliun. Adanya usulan ini diharapkan bisa menunjang anggaran tahun 2025 yang dinilai turun jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2024.

Sebelumnya, KKP memperoleh anggaran tahun 2024 sebesar Rp6,55 triliun, namun kini anggaran KKP tahun 2025 yang diperoleh sebesar Rp6,2 triliun. Meskipun demikian, Komisi IV tetap mendukung KKP bisa memaksimalkan dampak dari kegiatan bantuan pemerintah yang menunjang sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR Anggia Erma Rini saat membuka agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR dengan jajaran Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9). Dukungan ini merupakan bukti Komisi IV DPR yang akan selalu mengawal kerja KKP.

Tidak hanya itu saja, adanya usulan penambahan anggaran ini diharapkan bisa mendukung KKP bekerja pada tahun 2025. Upaya ini berpotensi untuk memastikan kegiatan bantuan pemerintah yang menunjang sektor kelautan dan perikanan di Indonesia berdampak tetap signifikan.

"Kami mendukung KKP agar usulan tambahan anggaran tahun 2025 bisa disetujui. Selanjutnya, kami meminta KKP berkomitmen menambah kegiatan bantuan pemerintah di daerah, jika nantinya usulannya direalisasikan," tutur Politisi Fraksi PKB ini.

Selain itu, terkait soal KKP memperoleh anggaran yang berasal dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk tahun 2025, dirinya ingin anggaran dari sumber tersebut berdampak langsung bagi masyarakat yang mendukung sektor laut perikanan. Diketahui, anggaran PHLN KKP sebesar Rp1,3 triliun.

Di mana, porsi PHLN sebesar 22,9 persen dari pagu anggaran tahun 2025. Dirinya menegaskan perolehan PHLN KKP harus bisa menunjang pembangunan dan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan, petambak garam, serta pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan peraturan perundangan tutup Nasril. **um/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya

Sri Rahayu Minta Kemendes Fokuskan Pembangunan di 36 Daerah Tertinggal

FOTO: AFR/PDT

Anggota Komisi V DPR RI Sri Rahayu saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR dengan pejabat eselon I Kemendes PDTT di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Anggota Komisi V DPR RI Sri Rahayu meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk memfokuskan pembangunan dan pengembangan daerah tertinggal yang masih tersisa di 36 kabupaten/kota di Indonesia.

"Tolong program ke depan ini arahkan, fokuskan, pada daerah-daerah ini. Dari daerah ini kira-kira yang daerah tertinggalnya itu ada berapa, ada berapa desa? Sehingga, Bapak bisa menghitung sampai kapan Indonesia ini akan hilang daerah-daerah tertinggalnya, sehingga jelas gitu," kata Sri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR dengan pejabat eselon I Kemendes PDTT di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (2/9).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menyebut daerah tertinggal yang masih tersebar di 36 kabupaten ini masih terhitung banyak. Oleh karena itu, pembangunan dan pengembangan wilayah ini menjadi penting agar hal-hal yang perlu dibenahi terkait dengan daerah tertinggal yang masih tersisa di Indonesia bisa diselesaikan.

"Standarnya jelas, sehingga ukuran ke depannya jelas kira-kira berapa tahun kita mampu untuk menyelesaikan 36 daerah ini," ujar Legislator Dapil Jawa Timur VI ini.

Dalam RDP dengan Komisi V ini, Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Pembangunan Daerah Tertinggal (Ditjen PPDT) Kemendes PDTT FX Nugroho Setijo Nagoro menyebut daerah tertinggal di Indonesia saat ini berada di 36 kabupaten/kota. Total 36 wilayah tersebut, tersebar di Sumatera Utara empat kabupaten/kota, Nusa Tenggara Timur (6), Maluku (1), Maluku Utara (1), Papua (2), Papua Barat Daya (2), Papua Barat Daya (3), Papua Pegunungan (8), Papua Tengah (6), dan Papua Selatan (3). "Jumlah daerah tertinggal yang masih tersisa itu sebanyak 36 kabupaten," pungkasnya.

we/rdn

Scan QR untuk berita selengkapnya

Muslim: Harus Ada Reformasi Total BUMN di Bidang Farmasi

FOTO : ENO/PDT

Anggota Komisi VI DPR RI Muslim dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN Erick Thohir, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2024).

Anggota Komisi VI DPR RI Muslim menekankan pentingnya reformasi total pada BUMN (Badan Usaha Milik Negara) di bidang farmasi. Mengingat, BUMN farmasi Indofarma baru-baru ini tersandung kasus *fraud* hingga membuat kerugian perusahaan yang membengkak di tahun 2023.

"Ini menjadi *warning* khususnya di dunia farmasi. Kita lihat hampir di sebagian besar, saya nggak tau problemnya dimana ini, apakah Kimia Farma dan lain-lain saya *nggak* tau apakah sudah terlalu lama seperti ini. Memang harus ada reformasi total khususnya di dunia farmasi," kata Muslim dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN Erick Thohir, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (9/2).

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menilai selama ini BUMN Farmasi masih kalah dengan swasta. Padahal BUMN seharusnya memiliki kewenangan lebih. Ia pun mengapresiasi kinerja Menteri Erick dan jajaran yang telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan di BUMN Farmasi.

"Kita kalah terus dengan swasta. Padahal kita punya kewenangan lebih. Biarpun Pak Menteri telah banyak melakukan, termasuk mengamputasi beberapa BUMN yang kita anggap tidak produktif," imbuhnya.

Diketahui, pada Rabu (28/8) Komisi VI telah menerima serikat pekerja PT Indofarma. Mereka menyampaikan aspirasinya terkait hak-hak yang belum diberikan. Adapun dalam kesimpulan Raker dengan Kementerian BUMN tersebut, Komi-si VI mendorong penyelesaian permasalahan ketenaga-kerjaan yang dihadapi oleh PT Indofarma.

bia/rdn

Scan QR untuk berita selengkapnya

Jangan Pindah Tugaskan Guru PPPK Swasta ke Sekolah Negeri

FOTO: FHN/PDT

Anggota Komisi X DPR RI, Anita Jacoba saat kunjungan.

Polemik mengenai guru PPPK Swasta yang harus dialihkan ke sekolah negeri tak kunjung selesai. Hal ini menyebabkan banyak sekolah swasta yang akhirnya kehilangan guru-guru berpengalaman. Anggota Komisi X DPR RI Anita Jacoba Gah meminta Kemendikbudristek untuk segera mencari solusi atas masalah ini sehingga tidak terjadi diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta.

" Banyak guru-guru swasta yang sudah mengajar puluhan tahun, sudah bagus, tapi tiba-tiba sekarang diambil ke sekolah negeri. Jadi sekolah swasta banyak yang kosong, kasihan. Terus anak-anak yang di sekolah swasta siapa yang mau ngajar? bagaimana pemerintah pusat untuk ambil satu kebijakan ketika guru-guru swasrai itu sudah diangkat menjadi P3K biarkanlah mereka di sekolah asal," jelas Anita Jacoba Gah usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik bidang Pendidikan di Surabaya, Jawa Timur, Senin (26/8).

Tak berhenti disitu, Anggota Komisi X DPR RI Zainuudin Maliki juga melihat masih ada celah yang dimiliki oleh Kemendikbudristek untuk bisa tetap membiarkan Guru PPPK untuk tetap bisa mengajar di sekolah swasta, walaupun peraturan mengenai PPPK telah diatur oleh Undang-Undang ASN.

"Kita sudah *ngomong* kepada mas menteri, kepada dirjen, untuk dicari jalan keluar ya. Jangan hanya kalau ditanya 'kita ini terkunci oleh undang-undang ASN'. Carilah informasi atau langkah-langkah terobosan yang saya kira masih bisa dilakukan yaitu dengan (penerbitan SK) menempatkan guru PPPK di sekolah swasta. Jadi ASN yang menjalankan tugas negara meskipun tugasnya itu berada di swasta," jelas Zainuddin.

Dari hasil kunjungan kerja spesifik ini, nantinya Komisi X DPR RI akan terus memperjuangkan guru PPPK untuk tetap bisa mengajar di sekolah swasta, dengan melakukan rapat-rapat dengan pemerintah pusat dan para mitra kerja Komisi X DPR RI.

syn/aha

> **KITA SUDAH *NGOMONG* KEPADA MAS MENTERI, KEPADA DIRJEN, UNTUK DICARI JALAN KELUAR YA. JANGAN HANYA KALAU DITANYA 'KITA INI TERKUNCI OLEH UNDANG-UNDANG ASN'. CARILAH INFORMASI ATAU LANGKAH-LANGKAH TEROBOSAN YANG SAYA KIRA MASIH BISA DILAKUKAN YAITU DENGAN (PENERBITAN SK) MENEMPATKAN GURU PPPK DI SEKOLAH SWASTA. JADI ASN YANG MENJALANKAN TUGAS NEGARA MESKIPUN TUGASNYA ITU BERADA DI SWASTA.**
>
> **Anita Jacoba** Anggota Komisi X DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya

Ciptakan Diskriminasi, Program Penggerak Hanya Melahirkan Kelompok Elit dalam Ekosistem Pendidikan

Komisi X DPR mengingatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk memastikan setiap kebijakan yang diterbitkan harus berbasis pada prinsip keadilan. Dirinya menyayangkan Program Penggerak berpotensi melahirkan sejumlah permasalahan baru, seperti munculnya kelompok elit yang menciptakan diskriminasi dalam ekosistem pendidikan Indonesia.

Demikian hal ini diutarakan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih saat membuka agenda Kunjungan Komisi X DPR di SMAN 1 Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (25/8). Jika mengacu pada amanat konstitusi Negara UUD 1945, khususnya pasal 31, pendidikan nasional tidak hanya berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, namun juga untuk membangun peradaban bangsa.

"(Saya memperhatikan) Program Guru Penggerak, Sekolah Penggerak, dan Organisasi Penggerak berpotensi menimbulkan diskriminasi karena akan melahirkan kelompok elit, yang dianggap sebagai aktor utama perubahan pendidikan. Hal ini dipandang tidak demokratis, berdampak pada pembiaran pemberdayaan pelaku pendidikan, yang secara simultan. Seharusnya diintervensi oleh Kemendikbudristek sebagai pelaksana kebijakan," ungkap Fikri.

Selain itu, baginya, model *piloting* seperti itu harus dihindari karena dinilai terbukti tidak mempercepat difusi inovasi dan perubahan di sektor pendidikan. Menurutnya, Program Penggerak malah hanya mengukuhkan keberadaan kelompok-kelompok tertentu dalam transformasi pendidikan.

Di sisi lain, berdasarkan laporan yang ia terima, Politisi Fraksi PKS itu mengutarakan deretan kendala program penggerak lainnya. Di antaranya, kesiapan dan kompetensi SDM guru tidak linier, internet dan TIK yang menjadi kunci keberhasilan Program Sekolah Penggerak tidak terfasilitasi merata di seluruh sekolah, guru penggerak sebagai syarat untuk menjadi kepala sekolah dianggap tidak berkeadilan.

Selaras, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) dan Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) menyampaikan masih terdapat tantangan program sekolah penggerak di antaranya kendala geografis, sarana prasarana, sinergitas dengan Dinas Pendidikan Daerah, dan kurangnya ketersediaan SDM pendidik dan tenaga kependidikan yang beragam.

"Kemendikbudristek perlu saya ingatkan lagi, upaya untuk membangun bangsa dan peradaban bangsa dilakukan perlu dilakukan dengan peningkatan kualitas sumber daya pendidikan, tandas legislator daerah pemilihan Jawa Tengah IX itu. **um/rdn**

FOTO : TS/PDT

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih saat membuka agenda Kunjungan Komisi X DPR di SMAN 1 Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (25/8/2024).

Scan QR untuk berita selengkapnya

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana, saat mendampingi delegasi parlemen-parlemen di Afrika dalam kunjungan mereka ke Jenggala Ceramic di Bali, pada hari Senin (2/9/2024).
FOTO: DEP/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya